



► KEKERASAN JALANAN

Semakin Disebut, Geng Sekolah Makin Bangga

UMBULHARJO—Semakin sering nama kelompok atau geng sekolah disebut, akan membuat anggotanya semakin bangga. Meski pun penyebutan nama geng terkait dengan aksi kejahatan jalanan. Hal ini di sampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jogja, Achid Widi Rahmanto. Sehingga dalam kasus kekerasan jalanan, penyebutan dengan inisial dianggap lebih aman.

Dalam kasus kejahatan beberapa waktu lalu yang terjadi di Gedongkuning, Jogja, terjadi konflik antara dua kelompok pelajar. Achid merasa prihatin lantaran pelaku dan korban berasal dari sekolah yang berada dalam naungan Muhammadiyah, meski berbeda sekolah.

"Kami akan semakin intensif membina sekolah-sekolah. Sebenarnya sudah lama menginstruksikan untuk memutus mata rantai geng, namun ternyata tidak sederhana. Di geng dengan inisial M, bahkan sudah instruksikan dicari anak-anak yang memiliki bibit-bibit perilaku kejahatan, tolong kumpulkan. Pernah ada pembinaan di Brimob, namun ketika itu selesai, nyatanya muncul lagi," kata Achid, Rabu (13/4).

Sejak munculnya kejahatan jalanan dengan aktor pelajar, pengurus Muhammadiyah terus mencari formula yang bisa memutus rantai ini. Beberapa kendala termasuk masih terjalannya komunikasi antara alumni dan pelajar aktif.

Selain itu, media elektronik juga memiliki peran memperlanar dan mempermudah rencana melakukan kejahatan jalanan atau tawuran. Hal ini seperti kesepakatan untuk berkelahi atau lainnya. Lantaran masuk dalam ranah privat, cukup sulit mendeteksi sejak awal komunikasi antar geng.

"Kami betul-betul mengupayakan sekolah terhindar dari perilaku yang berujung pada kejahatan. Namun tidak jarang kondisi anak di rumah yang kurang harmonis atau lainnya berpotensi menjadi pemicu. Dalam kasus kejahatan jalanan, korban tidak hanya mereka yang terluka, namun sekolah juga menjadi korban dengan tercemarnya nama baik," katanya. *(Sirojul Khaffid)*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

